

Pengaruh Kompetensi Aparatur, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua

Sriyanti Tome¹ ✉ Muh Yamin Noch ² Zakaria ³ Fahrudin Pasolo ⁴ Yaya Sonjaya ⁵
^{1,2,3,4,5} Universitas Yapis Papua

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Kompetensi Aparatur, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua, teknik pengambilan sampel Jenuh dengan jumlah sebanyak 102 responden pada organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Papua. Berdasarkan hasil Uji parsial dan uji simultan menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua, Hasil anslisis uji f dengan perolehan f hitung sebesar 78,223 dengan tingkat signifikansi 0,000 perolehan Nilai adjusted r-square sebesar 0,69,6 mengandung arti bahwa variabel I Kompetensi Aparatur, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Internal memberikan kontribusi sebesar 69,6% terhadap peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua, Sedangkan sisanya 30,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti; kualitas laporan keuangan, pengalaman kerja, pelatihan, pendidikan, penggunaan teknologi informasi, fasilitas kerja, kompensasi dan variabel-variabel lain. Variabel yang paling dominan memberikan kontribusi dalam meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah variabel kompetensi aparatur.

Kata Kunci: *Kompetensi Aparatur, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*

Copyright (c) 2023 Tome et al

✉ Corresponding author :

Email Address : ysri31328@gmail.com , abinoch18@gmail.com , fahrudinpasolo@gmail.com ,
zakariahatta15@gmail.com , ya2sonjaya@gmail.com

PENDAHULUAN

Dengan ditandatanganinya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan rakyat Papua. Argawati (2021), Otonomi khusus bagi Provinsi Papua

pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas kepada Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sesuai peraturan perundang-undangan.

Secara spesifik Undang-undang Otonomi Khusus Papua bertujuan untuk mengurangi terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dengan Provinsi lain, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua dalam mengelola pemerintahan di daerahnya. Selama kurun waktu 20 tahun pemberian kewenangan pemerintah pusat terhadap daerah melalui otonomi khusus di Papua, masih belum memberikan dampak perbaikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat Papua meskipun telah digelontorkan dana trilunan disetiap tahun anggaran. Menurut Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, dana Otonomi Khusus untuk provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Papua sejak tahun anggaran 2002 hingga 2022 sebesar Rp 139.079.135.529.718,-.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait dengan pelaksanaan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, maka Pemerintah Provinsi Papua mempunyai kewenangan untuk mengatur, menetapkan dan mengendalikan pengelolaan dana otonomi khusus. Pengelolaan yang optimal dapat mendorong pemanfaatan dana otonomi khusus tersebut secara berdaya guna dan hasil guna, sesuai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Papua. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000).

Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah adalah bukti konsisten atau tidaknya pemerintah memenuhi standar yang sudah ada. Sebagai kewajiban sekaligus penguatan akuntabilitas sebuah laporan keuangan, laporan dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada internal organisasi namun juga eksternal organisasi. Pihak internal organisasi yang paling kompeten dalam alur pelaksanaan akuntabilitas adalah kementerian atau lembaga terkait sedangkan pihak eksternal organisasi dapat merujuk pada lembaga resmi yang bersifat independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan BPK bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Pertama aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kedua aspek kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP. Ketiga aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan terakhir aspek efektifitas sistem pengendalian intern.

Salah satu indikator laporan keuangan dikatakan transparan adalah opini BPK atas laporan keuangan. Jika opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dikatakan laporan keuangan sudah transparan. opini WTP secara umum menggambarkan adanya perbaikan akuntabilitas keuangan oleh kementerian/lembaga dalam

menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas menjadi salah satu komponen pokok guna mewujudkan good governance. Mentu dan Sondakh, (2016):

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI yang dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara, menyimpulkan bahwa opini atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke delapan kalinya yang diraih oleh Provinsi Papua. namun hasil pemeriksaan tersebut masih menemukan catatan yang hendaknya menjadi perhatian pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua, diantaranya; penggunaan langsung atas retribusi pelayanan kesehatan, kesalahan penganggaran jenis belanja pada 23 OPD dan masih terdapat temuan pemeriksaan yang mempengaruhi pencapaian efektifitas program yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua, antara lain pemerintah daerah provinsi Papua belum optimal dalam memberdayakan masyarakat miskin dengan tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Tiara Pasific pos.com (Juni 2022)

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan terkait dengan kondisi organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Papua, pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dan berorientasi pada kinerja, namun masih ditemukan adanya ketidak tepatan dalam penginputan akun anggaran, keterlambatan proses peningutan laporan yang berdampak pada keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan, sehingga akuntabilitas kinerjanya juga menjadi kurang efektif. Selain itu juga, pengukuran kinerja yang meliputi input, output dan outcome, belum dipahami secara menyeluruh oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. Hidayatullah dan Herdjino (2014) berpendapat bahwa, pemerintah selaku pengguna dana publik agar dapat memenuhi akuntabilitas yaitu harus memperhatikan beberapa hal antara lain: anggaran, sistem pengendalian, dan sistem pelaporan. Oleh karena itu masing-masing OPD sebagai pengelola anggaran harus memiliki Sumberdaya Manusia yang berkompeten dalam penyusunan laporan keuangan.

Penyelenggaraan birokrasi di Indonesia tidak terkecuali dalam penyelenggaraan pemerintahan di pemerintah daerah provinsi Papua, persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai masih belum berkompeten sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik yang dinilai rendah. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak berkompeten tersebut berasal dari rangkaian proses rekrutmen ASN yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan peran pada setiap lembaga pemerintahan.

Beberapa isu yang mendesak pengembangan SDM aparatur diantaranya yaitu kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah, integritas ASN masih relatif rendah, penerapan e-government masih belum merata dan optimal, organisasi gemuk dan tumpang tindih fungsi, kualitas pelayanan masih rendah, dan yang paling utama masih rendahnya kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan sehingga kinerja yang dihasilkan tidak optimal. pengembangan SDM aparatur merupakan penunjang keberhasilan peran lembaga Negara yang kemudian dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Oleh karena itu yang dibutuhkan dalam pengembangan SDM aparatur yaitu harus ada tuntutan pada

kewajiban setiap lembaga untuk merencanakan bagaimana model pengembangan SDM yang akan diterapkan nantinya dan juga memasukan rencana anggaran pengembangan SDM aparatur pada rencana anggaran lembaga yang akan dibelanjakan pada setiap tahunnya.

Faktor pertama yang menjadi daya tarik dalam optimalisasi akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah kompetensi Aparatur. Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah adalah tingkat kemampuan aparatur pemerintah daerah (yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap) untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif sesuai standar yang ditetapkan. Kompetensi sering diartikan sebagai keterampilan, kemampuan dan kecakapan. Menurut Sagala (2009) pengertian kompetensi yaitu seseorang yang memiliki suatu karakteristik yang berdampak langsung pada kinerja yang sangat baik. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokoknya, maka semakin baik kualitas kinerja yang dihasilkan Achmad, (2013). Hasil penelitian Sutrepti (2022) menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Se Kecamatan Petang didukung penelitian yang dilakukan oleh Komang Rediastiti (2022) bahwa Kompetensi Aparatur berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Dana Desa di Kabupaten Buleleng, namun kedua penelitian tersebut bertentangan dengan penelitiannya Muzahid (2021) dan Widayatama dkk (2017) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

Dalam optimalisasi akuntabilitas kinerja pemerintah faktor yang perlu diperhatikan yaitu kejelasan sasaran anggaran, Kejelasan sasaran sangat penting bagi organisasi untuk mempermudah dalam mempertanggung-jawabkan kegagalan dan keberhasilan dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan sejauhmana tujuan organisasi ditetapkan secara jelas dan spesifik sehingga akan mempermudah pelaksanaan anggaran dalam mempertanggungjawabkan semua program yang telah diimplementasikan. Dalam penyusunan anggaran, anggaran yang disusun harus jelas sasaran yang ingin dicapai. Bhakti, dkk., (2015). Anggaran yang tidak jelas sasarannya, sudah dapat dipastikan akan menghadapi kesulitan dalam pelaksanaannya dan bahkan menjadi gagal.

Hasil penelitian Widyawati (2022) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kabupaten Sidoarjo yang di dukung penelitian Yuliastuti dan Riharjo (2021) hasil penelitiannya menunjukkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya, namun kedua penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Pebriyanto dan Sumadi (2021) dimana Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Se-Kecamatan Sukawati) dan penelitian Ariyandani (2020) bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mariso Kota Makassar.

Selain kompetensi aparatur dan Kejelasan sasaran anggaran, faktor yang penting dalam optimalisasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu pengendalian internal. Pengendalian internal yaitu suatu perbuatan, usaha dan kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan dan semua pegawai agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan cara pelaporan keuangan yang baik, tertib pada peraturan

perundang undangan, kegiatan yang efektif dan efisien dan keamanan asset negara (Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008). Sistem pengendalian internal sangat mempengaruhi tingkat kualitas akuntabilitas suatu organisasi. Penelitian Yuliastuti dan Riharjo (2021) hasil menunjukkan sistem pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya yang didukung oleh penelitian Dwipayani (2022) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor desa se-kecamatan marga di kabupaten Tabanan, namun penelitiannya bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Mulya (2022) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sugai Penuh.

Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah adalah tingkat kemampuan aparatur pemerintah daerah yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap, untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya secara efisien dan efektif sesuai standar yang ditetapkan. Menurut (Sedarmayanti 2017), mendefinisikan kompetensi aparatur adalah sebagai berikut : "Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku, perilaku tertentu atau tipe dan tingkat perilaku yang berbeda yang dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil dan unggul/superior". Menurut Sedarmayanti (2017), komponen kompetensi adalah sebagai berikut; Dorongan (motives), Sifat (traits), Citra Diri (self concept), Pengetahuan (knowledge) dan Keterampilan (skill).

Dalam perkembangan era digitalisasi revolusi 4.0, menuntut sumber daya aparatur yang prima, dalam kehidupan masyarakat sudah sangat terbuka dan dapat memilih dengan berbagai jenis kemungkinan pilihan melalui pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang ditandai dengan perubahan informasi yang begitu cepat berubah sehingga penguasaan ilmu dan teknologi semakin sulit dikuasai oleh manusia karena manusia mempunyai kemampuan otak yang terbatas. Kompetensi menurut Cheng et al. (2002) kompetensi adalah seseorang yang memiliki knowledge (pendidikan, keahlian dan pengalaman) dan perilaku etis dalam bekerja. Cheng et al. (2002) menyatakan kompetensi meliputi empat komponen yaitu functional expertise, Broad sector prespective, leadership qualities, and personal attributes. Hal tersebut sejalan dengan Nur Afiah (2004).

Kompetensi sumber daya manusia yang mencakup kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara aktif dan efisien Pramudiarta, (2015) dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten akan menjadi aset yang sangat berharga bagi suatu pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan dapat menjadi dasar atau acuan dalam pengambilan keputusan bagi pengguna baik internal maupun eksternal.

Perencanaan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi. Demikian juga, anggaran mempunyai posisi sangat penting. Anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Pemikiran

strategis di setiap organisasi adalah proses dimana manajemen berpikir tentang pengintegrasian aktivitas ke arah tujuan organisasi. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi, dan ekonomi eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun strategi. Pemikiran strategis manajemen didokumentasikan dalam berbagai dokumen perencanaan. Keseluruhan proses diintegrasikan dalam prosedur penganggaran organisasi. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Didalam tampilannya, anggaran selalu menyertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Bastian (2005). Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun oleh manajemen dalam jangka waktu tertentu untuk mengungkapkan penerimaan dan pengeluaran secara rinci dalam suatu proyek.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Sedangkan menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Kejelasan sasaran anggaran merupakan gambaran perencanaan terhadap tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Bastian (2005). Pengelolaan keuangan pemerintah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya yang tepat agar tercapainya kinerja yang baik dan menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Fauzan (2015). Anggaran memiliki posisi yang penting dalam pengendalian manajemen sebagai informasi perencanaan keuangan agar dapat mengevaluasi kinerja para pegawai atau aparat negara. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Penganggaran sektor publik, terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja, dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Khumaidah (2018).

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut Suhartono dan Solihin, (2011). Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Bastian, (2001), oleh karena itu kejelasan sasaran anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dilakukan untuk melindungi aset dari segala tindakan seperti penyalahgunaan, menjamin akuratnya informasi mengenai akuntansi, serta menjamin bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diterapkan pada seluruh pejabat publik, dengan ini pengendalian internal juga digunakan untuk memantau apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang ada. Menurut Mulyadi (2002), Sistem pengendalian

internal merupakan segala proses atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu bentuk rangkaian kegiatan yang saling berhubungan pada suatu organisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem pengendalian internal merupakan sebuah proses integral yang dilakukan pemimpin dan pegawai pada setiap tindakan secara terus menerus oleh dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan kekayaan atau aset negara serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pemaparan teori dari berbagai pihak mengenai sistem pengendalian internal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal merupakan prosedur yang diterapkan dalam setiap kegiatan organisasi yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai tujuan tertentu.

Secara garis besar ada empat komponen tujuan pengendalian internal, PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem c Intern Pemerintah antara lain: a). mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien transparan, dan akuntabel. b). mengamati, memeriksa ketelitian dan kebenaran pada data akuntansi c). memberikan keyakinan agar tercapainya efektifitas pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengamanan kekayaan negara, dan d). ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

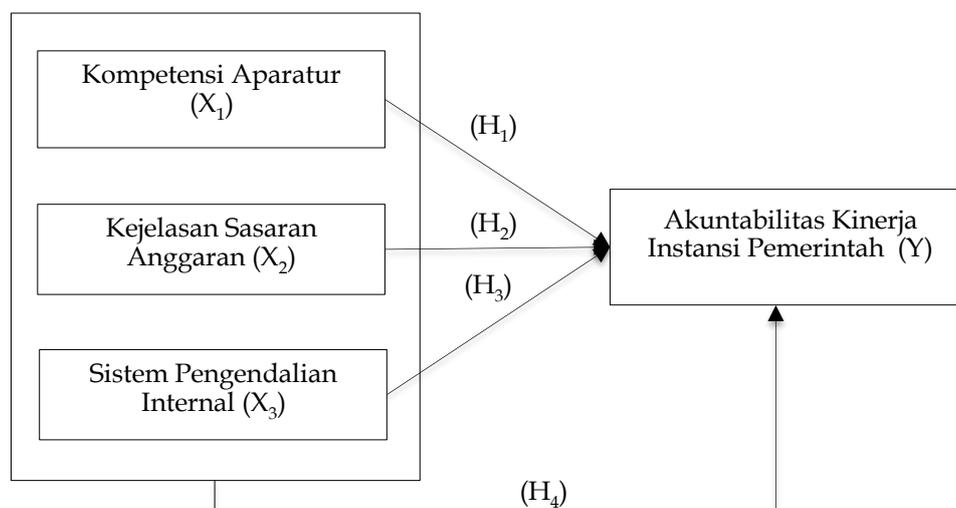
Kegiatan Pengendalian Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang wajib dilakukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan prosedur untuk mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kegiatan pengendalian ini dapat membantu memastikan bahwa arahan yang diberikan pimpinan telah dilaksanakan serta kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Akuntabilitas merupakan upaya yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas sangat penting dilakukan pada bidang pemerintahan, karena merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan good governance. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban individu dalam mengelola kekayaan atau aset yang telah diberikan dengan tujuan mencapai tujuan organisasi berupa laporan akuntabilitas kinerja yang dilaporkan secara periodik. Menurut pendapat Mardiasmo (2018), akuntabilitas adalah bentuk kewajiban dalam melaporkan berhasil atau tidaknya mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan yang telah dirancang.

Akuntabilitas merupakan kewajiban yang diberikan amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh kegiatan kepada yang menjadi tanggungjawab yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta hasil pertanggungjawaban tersebut. Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa, akuntabilitas merupakan suatu upaya dalam mempertanggungjawabkan kewajiban yang telah diberikan atau diamanahkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Mardiasmo (2018).

Menurut TIM AKIP BPKP (2000) kinerja merupakan suatu kondisi yang perlu diketahui dan dilaporkan kepada pihak yang telah ditetapkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pencapaian dari suatu organisasi yang berkaitan dengan tujuan dan visi misi serta untuk mengetahui dampak dari suatu kebijakan yang dibuat. Sedangkan menurut Bastian (2006), kinerja merupakan gambaran yang berisikan tingkat pencapaian dalam melaksanakan kegiatan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi, dan misi organisasi yang tertulis dalam perumusan rencana kerja.

Akuntabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan indikator masukan, keluaran, proses, hasil, manfaat serta dampak yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Hal ini telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah berarti pembuktian atas kewajiban instansi dalam melaksanakan tanggungjawabnya atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut LAN dan BKP (LAN & BKPP, 2000), akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban atau menjawab serta menjelaskan yang diberikan kepada instansi mengenai kinerja dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta sebuah pertanggungjawaban. Hal ini berarti seluruh instansi pemerintah, bagian atau lembaga negara di pusat maupun daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitas masing-masing karena akuntabilitas meliputi keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi misi instansi pemerintah.

Kerangka konseptual penelitian ini diambil berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu. Kerangka konseptual yang diajukan dalam penelitian ini meliputi kompetensi aparatur, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian internal sebagai variabel independen dan akuntabilitas kinerja sebagai variabel dependen. Dari beberapa beberapa hasil penelitian terdahulu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa, dan memberikan penjelasan atau asumsi yang sifatnya sementara terhadap jawaban yang sesungguhnya, pada kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar. 1; Kerangka Konseptual Penelitian

- H1 :** Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua.
- H2 :** Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua.
- H3 :** Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua.
- H4 :** Kompetensi aparatur, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua

METODOLOGI

Berdasarkan tujuan penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan (explanatory), penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dan pengaruhnya dengan pengujian hipotesis Sugiyono (2017). Rancangan dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran dengan cara obyektif terhadap fenomena sosial yang dijabarkan kedalam beberapa komponen masalah, variabel dan indikator (Sugiyono, 2017). Populasi merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan Noch & Husen (2015). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 105 Aparatur Sipil Negara pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Papua, dimana dari 35 OPD masing-masing diwakili oleh 3 ASN atau responden yang melaksanakan tugas dalam penyusunan laporan keuangan, melaksanakan pelayanan publik dan pegawai yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan. Teknik pengambilan sampel yaitu sampel Jenuh yaitu sebanyak 105 responden pada organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Papua dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. (Sugiyono, 2017). Variabel dalam penelitian ini meliputi variable bebas (independent) meliputi yaitu: Kompetensi (X1), Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) dan Sistem Pengendalian Intern (X3) dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) sebagai variabel terikat (Dependent).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 dinyatakan bahwa AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Instrumen yang digunakan dalam penelitian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menggunakan 4 dimensi yaitu: 1). Akuntabilitas kebijakan; 2). Akuntabilitas program; 3). Akuntabilitas proses; 4). Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (Mardiasmo, 2009).

Kompetensi Aparatur (X1)

Kompetensi aparatur adalah Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku, perilaku tertentu atau tipe dan tingkat perilaku yang berbeda yang dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien. indikator Kompetensi aparatur daerah antara lain: 1) pengetahuan, 2) keterampilan dan 3) pengalaman. Sedarmayanti (2017).

Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Instrumen yang digunakan dalam penelitian kejelasan sasaran menggunakan 7 dimensi yaitu 1). Tujuan, 2). Kinerja, 3). Standar, 4). Jangka Waktu, 5). Sasaran Prioritas, 6). Tingkat Kesulitan dan 7). Koordinasi. Widiya Restu, (2017)

Sistem Pengendalian Internal (X3)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 tentang sistem pengendalian intern pemerintah bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Indikator Sistem Pengendalian Intern, Dalam PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa unsur-unsur pembentuk Sistem Pengendalian Intern (SPI) antara lain: 1). Lingkungan pengendalian, 2). Penilaian Risiko, 3). Kegiatan Pengendalian, 4). Informasi dan Komunikasi, dan 5). Pemantauan Pengendalian Intern.

Pengujian terhadap validitas dan reliabilitas data ini dilakukan dengan menggunakan program statistik SPSS for windows 22.0 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen, sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya atau dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud Arikunto (2017). Sementara menurut Sugiyono (2017), hasil penelitian yang valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Bila nilai r hitung (pearson correlation) lebih besar dari r tabel maka dikatakan valid dan sebaliknya tidak valid.

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Sebuah instrumen dikatakan reliabel, jika mendapatkan hasil yang sama dari gejala pengukuran yang tidak berubah yang dilakukan pada waktu yang berbeda-beda. Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung Cronbach's alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's alpha $> 0,70$. Ghozali (2018).

Pengujian asumsi klasik meliputi; Uji Normalitas, uji autokorelasi, Uji heterokedastisitas dan uji multikolinearitas dengan pengujian analisis data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Uji Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan dalam melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Kompetensi Aparatur, Kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian internal sebagai variabel bebas (Independent) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai variabel terikat (Dependent). Pembuktian terhadap hipotesis dengan empat variabel bebas sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen Ghozali (2018). Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dengan tingkat signifikannya 5%. Kriteria pengujiannya adalah; jika t hitung $> t$ tabel maka hipotesis

diterima. Uji hipotesis lain yang digunakan dalam penelitian ini juga adalah dengan membandingkan nilai ρ probabilitas (sig), dimana jika nilai probabilitas (sig) $< 0,05$ maka hipotesis diterima.

Uji f

Uji statistik F dikenal dengan uji simultan adalah uji yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Bila nilai Fhitung $> Ftabel$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dengan nilai signifikan $< 5\%$ atau $0,05$ dan sebaliknya jika nilai Fhitung $< Ftabel$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak dengan nilai signifikan $> 5\%$ atau $0,05$.

Uji Koefisien Determinan (R2)

Pada Pengujian koefisien determinasi (R2) dari kedua persamaan yang merupakan koefisien yang menunjukkan besarnya persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen Ghozali (2018). Tingkat signifikansi yang digunakan dalam adalah $0,05$ atau 5% . Koefisien determinasi (Adjusted R2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen Nilai Adjusted R2 lebih kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari instrument hasil penelitian Deskriptif statistik diperoleh data sesuai dengan variabel yang dianalisis yaitu variabel tingkat kompetensi aparatur (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2) dan pengendalian internal (X3), dan variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Angka nilai Descriptive Statistics yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 5.10. sebagai berikut:

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Deviasi
Kompetensi Aparatur	102	2,40	5,00	3,9010	0,63768
Kejelasan Aasaran Anggaran	102	3,00	5,00	4,1431	0,52831
Pengendalian Internal	102	2,40	5,00	3,9784	0,68356
Akuntabilitas Kinerja	102	2,50	4,90	4,0843	0,56441
Valid N (listwise)	102				

Sumber: Olah Data 2022, SPSS 26.0 for windows

Dari hasil analisis deskripsi variabel penelitian ini dimana tanggapan responden atas variabel independen menunjukkan bahwa kompetensi aparatur (X1) menunjukkan bahwa nilai rata-rata adalah sebesar $3,90098$ dngan standar deviasi sebesar $0,63768$. kejelasan sasaran anggaran (X2) menunjukkan bahwa nilai rata-rata adalah sebesar $4,14314$ dengan standar deviasi sebesar $0,52831$. Pengendalian internal (X3) menunjukkan bahwa nilai rata-rata adalah sebesar $3,97843$ dengan standar deviasi sebesar $0,68356$ dan nilai rata-rata Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) sebagai variabel devenden adalah sebesar $4,08431$ dengan standar deviasi sebesar $0,56441$.

Berdasarkan hasil uji validitas diketahui bahwa semua butir pernyataan untuk variabel kompetensi aparatur (X1), kejelasan sasaran anggaran (X2), pengendalian

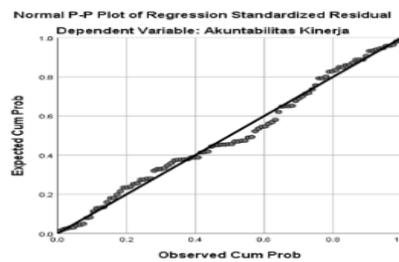
internal (X3) dan variabel Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dari setiap variabel penelitian memiliki nilai korelasi product moment atau nilai r hitung lebih besar dari nilai kritis r tabel atau R Hitung > R Tabel dengan $\alpha = 0,05$ atau 5% dan Corrected Item-Total Correlation masing-masing indicator > 0,195, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan penelitian valid. hasil statistik secara keseluruhan perolehan Cronbach's Alpha Based on Standardized Items sebesar 0,855 > 0,80 menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan sangat reliabel dan hasil analisis data kuisisioner dapat dilanjutkan. Dari hasil analisis uji reliabilitas diperoleh nilai alpha cronbach's masing-masing variabel dengan menggunakan program SPSS versi 26.0 for windows, dimana realibilitas dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

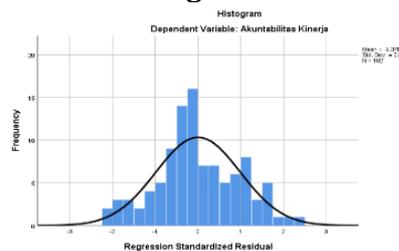
Variabel	No Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kompetensi aparatur	9	0,795	Reliabel
Kejelasan sasaran anggaran	7	0,892	Sangat Reliabel
Pengendalian internal	5	0,787	Reliabel
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	10	0,770	Reliabel

Sumber : Olah Data 2023

Uji normalitas berfungsi untuk menguji apakah dalam bentuk sebuah model regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normalitas. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.



Gambar 1. Histogram Normalitas



Gambar 2. Normal Plot Regresi

Sumber : Data diolah tahun 2023

Berdasarkan tabel 3 hasil uji Kolmogorof-Smirnov pada penelitian ini telah memenuhi unsur normalitas. Hal ditunjukkan dengan dengan nilai Asymp.Sig. (2 failed) sebesar 0,158c.d

**Tabel 3. Hasil Uji Kolmogorof-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Unstandardized Residual

N		102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.06340174
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.076
	Negative	-.045
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.158 ^c

Sumber : Olah Data 2023

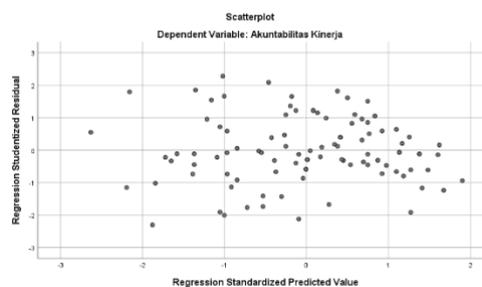
Mendeteksi multikolinieritas dapat melihat nilai tolerance dan varian inflation factor (VIF) sebagai tolak ukur. Apabila nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut terdapat multikolinieritas Hasil

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kompetensi aparatur (X ₁)	0,500	1,999
Kejelasan sasaran anggaran (X ₂)	0,759	1,318
Pengendalian internal (X ₃)	0,439	2,276

Nilai tolerance Kompetensi aparatur (X₁) sebesar 0,500, Kejelasan sasaran anggaran (X₂) sebesar 0,759, Pengendalian internal (X₃) sebesar 0,439 dimana tingkat toleransi dari masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,10 sedangkan nilai VIF Kompetensi aparatur (X₁) sebesar 1,999, Kejelasan sasaran anggaran (X₂) sebesar 1,318, Pengendalian internal (X₃) sebesar 2,276, maka dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing variabel independen memiliki nilai ≤ 10 , dimana dan nilai Tolerance lebih besar dari 0,50, hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas, dan hal ini juga menjelaskan bahwa semua variabel dapat digunakan sebagai variabel yang saling independen, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada variabel independen dalam penelitian ini.

Hasil dari grafik scatterplot diatas menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.



Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model Analisis Regresi

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen

dengan variabel independen. Untuk menentukan persamaan regresi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji f

	<i>Unstandardized Coefficients</i>		T _{hitung}	Sig
	(B)	Standar error		
(Constant)	6,303	2,673	2,358	0,020
Kompetensi aparatur (X ₁)	0,497	0,069	7,248	0,000
Kejelasan sasaran anggaran (X ₂)	0,166	0,067	2,465	0,015
Pengendalian internal (X ₃)	0,208	0,068	3,046	0,003

Pembahasan

Pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan OPD Pemerintahan Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kompetensi seorang pegawai dalam tugas dan tanggungjawab melaksanakan pekerjaan yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan OPD Pemerintahan Provinsi Papua, semakin tinggi kompetensi aparatur akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dalam menyampaikan pertanggungjawabannya serta meningkatkan pelayanan publik.

Kompetensi adalah seseorang yang memiliki knowledge (pendidikan, keahlian dan pengalaman) dan perilaku etis dalam bekerja. kompetensi meliputi empat komponen yaitu functional expertise, Broad sector prespective, leadership qualities, and personal attributes Cheng et al. (2002). sedangkan Nur Afiah (2004) menyatakan komponen kompetensi meliputi Pengetahuan, Pengalaman, Mutu kepemimpinan berupa etika subjektif dan etika objektif dan keterampilan. Pengetahuan diperoleh dari pendidikan, keahlian, dan pelatihan. Kompetensi aparatur yang baik berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kompetensi yang kuat akan membantu aparatur untuk lebih efektif menjalankan tugas mereka, mengoptimalkan penggunaan sumber daya publik, dan bertanggung jawab secara transparan kepada publik. Kompetensi aparatur merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mencapai hasil yang diharapkan, memberikan laporan yang jelas dan terbuka, serta bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya publik.

Kompetensi aparatur yang baik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan OPD Provinsi Papua, berdasarkan hasil observasi dapat dianalisis beberapa aspek yang mempengaruhi kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas kinerja, antara lain:

- 1) Kompetensi aparatur yang mengelola keuangan dan anggaran dilingkungan OPD Provinsi Papua sudah yang baik, kompetensi aparatur yang baik akan cepat memahami dengan jelas tentang tugas dan pekerjaannya. Ketika aparatur

- memiliki pemahaman yang kuat pegawai cenderung lebih mampu menjalankan tugas-tugas dengan akurat dan bertanggung jawab.
- 2) Kompetensi aparatur yang bekerja dilingkungan OPD Provinsi Papua memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaannya. Ketika aparatur memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai pegawai akan lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya.
 - 3) Kompetensi aparatur yang bekerja dilingkungan OPD Provinsi Papua memiliki sikap etis dan integritas yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Aparatur yang memiliki integritas tinggi akan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang tinggi, serta memastikan akuntabilitas dalam melaksanakan pekerjaannya.
 - 4) Kompetensi aparatur yang bekerja dilingkungan OPD Provinsi Papua memiliki kemampuan yang cukup untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja dan tuntutan tugas yang berkembang. Kemampuan beradaptasi yang baik memungkinkan aparatur untuk tetap akuntabel dalam menghadapi tantangan baru dan memastikan bahwa kinerja pegawai tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pebriyanto dan Sumadi (2021) yang menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Se-Kecamatan Sukawati). Yamin (2021) penelitiannya menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan), menurut muzahhid (2021) Kompetensi Aparatur berpengaruh Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Jumardi dkk (2022) yang menyatakan Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah studi pada satuan kerja di wilayah KPPN Makassar.

Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Provinsi Papua. Semakin baik transparansi dan kejelasan sasaran anggaran akan dapat meningkatkan akuntabilitas di masing-masing OPD. Kejelasan sasaran anggaran dilingkungan OPD Provinsi Papua memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertanggungjawaban pemerintah, sehingga pemerintah dapat memberikan laporan yang lebih terperinci dan transparan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang penggunaan dana publik serta untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana publik, dan memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap realisasi anggaran.

Dengan Kejelasan sasaran anggaran dilingkungan OPD Provinsi Papua dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena ketika masyarakat memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana dana publik dialokasikan dan digunakan, serta melihat adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Allen Schick (1985) mengemukakan bahwa kejelasan sasaran anggaran mencakup dua dimensi, yaitu kejelasan alokasi dan kejelasan penggunaan. Kejelasan

alokasi terkait dengan pemahaman yang jelas tentang prioritas dan tujuan pengeluaran pemerintah, sedangkan kejelasan penggunaan berkaitan dengan transparansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. pentingnya kejelasan sasaran anggaran dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Kejelasan sasaran anggaran membantu dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Afdhal dan Rahayu (2022) menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah, perangkat Daerah Kabupaten Soppeng. Mulya dan Fauzihardani (2022) menyatakan Kejelasan Sasaran Anggaran, berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian lain yang dilakukan Dwipayani dan Hutnaleontina (2022) menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan, penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Pebriyanto dan Sumadi (2021) yang menyakatan Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Se-Kecamatan Sukawati).

Berdasarkan hasil observasi, ada beberapa aspek Kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, antara lain:

- 1) Dengan kejelasan sasaran anggaran OPD Provinsi Papua dapat dijadikan sebagai acuan dan kontrol untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya secara transparan dalam menciptakan akuntabilitas yang kuat terhadap penggunaan anggaran serta mendorong organisasi perangkat daerah di Provinsi Papua untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik.
- 2) Kejelasan sasaran anggaran OPD Provinsi Papua dapat menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Kinerja instansi pemerintah dapat dievaluasi secara objektif berdasarkan pencapaian hasil yang telah ditetapkan dalam anggaran. Kejelasan sasaran anggaran memungkinkan pemantauan yang efektif terhadap realisasi anggaran dan hasil kinerja, sehingga mendorong akuntabilitas kinerja yang lebih baik.
- 3) Dengan Kejelasan sasaran anggaran pada OPD Provinsi Papua dapat membantu dalam mengendalikan pengeluaran instansi pemerintah, bahwa dana digunakan secara efisien dan efektif sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.

Kejelasan sasaran anggaran akan memberikan kemudahan dan kelancaran pada OPD Provinsi Papua untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban yang komprehensif kepada publik, dengan menyajikan informasi keuangan dan kinerja yang lebih transparan, sehingga dapat menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk akuntabilitas publik terhadap pengelolaan dana public.

Pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD dilingkungan pemerintah provinsi Papua. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pengendalian internal memberikan dampak terhadap terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan penelitian Tamba (2021) penelitiannya menunjukkan bahwa pengendalian intern memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja OPD Kabupaten Simalungun. Aprilianti dkk, (2020) Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di wilayah Jakarta Selatan dan penelitian Riski Amaliya dan Maryono (2020) menyatakan Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Sukolio Kabupaten Pati. Berdasarkan hasil analisis dan observasi melalui pelaksanaan pengendalian internal yang baik dilingkungan OPD Provinsi Papua sangat untuk memastikan bahwa tata kelola instansi pemerintah berjalan efisien, efektif, serta sesuai dengan standar dan kebijakan yang ditetapkan. Dengan pelaksanaan pengendalian internal membantu OPD Provinsi Papua dalam mengidentifikasi risiko terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan atau penyelewengan dalam pelaksanaan tugas, sehingga meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Pengendalian internal dilingkungan OPD Provinsi Papua dapat membantu memastikan bahwa instansi pemerintah beroperasi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan. Melalui penerapan pengendalian yang tepat, termasuk pemisahan tugas, pemeriksaan internal, dan pemantauan yang berkelanjutan, instansi pemerintah dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, pengendalian internal yang baik memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan pengendalian internal pada OPD Provinsi Papua sudah berjalan cukup baik, namun masih sangat diperlukan untuk melakukan peningkatan dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah agar proses tata Kelola organisasi dilingkungan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik dan akuntabel. Pemerintah daerah perlu menyadari dan melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengendalian melalui, perbaikan struktur organisasi, meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia, memperkuat teknologi dan infrastruktur, meningkatkan pemantauan dan pemantauan, serta meningkatkan komunikasi dan transparansi. Jika pengendalian internal dapat ditingkatkan untuk mencapai akuntabilitas yang lebih baik dalam pemerintahan daerah akan terwujud.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengendalian internal pemerintah adalah membangun komunikasi dan transparansi, karena kurangnya komunikasi yang efektif antara unit-unit organisasi atau antara pemerintah daerah dengan masyarakat dapat menjadi hambatan dalam pengendalian internal. Komunikasi yang tidak memadai dapat menyebabkan ketidakjelasan informasi atau kebijakan, sehingga meningkatkan risiko ketidakakuratan dan penyelewengan. Transparansi yang kurang juga dapat mengurangi pertanggungjawaban dan akuntabilitas.

Pengaruh kompetensi aparatur, kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD dilingkungan pemerintah provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa dari ketiga variabel dalam yang diteliti dalam penelitian ini, secara umum memberikan

kontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 69,6% oleh karena itu dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu untuk terus melakukan peningkatan kompetensi aparatur melalui kegiatan pelatihan, pengembangan kualifikasi Pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi aparatur.

Hasil penelitian ini, Pebriyanto dan Sumadi (2021) penelitiannya menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara simultan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Se-Kecamatan Sukawati). Muzahid (2021) Pengaruh Kompetensi Aparatur, Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan OPD Provinsi Papua, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain:

- 1) Adanya Transparansi dan Publikasi Informasi: Pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi dengan mempublikasikan informasi yang relevan, termasuk anggaran, kebijakan, program, dan laporan kinerja. Informasi ini harus mudah diakses oleh masyarakat melalui situs web resmi, pertemuan publik, atau saluran komunikasi lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.
- 2) Meningkatkan Partisipasi Publik: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas. Hal ini membantu membangun rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan dan memastikan bahwa kepentingan mereka diakomodasi.
- 3) Konsistensi Audit dan Pemeriksaan Independen: Melakukan audit dan pemeriksaan independen terhadap keuangan dan kinerja pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas. Audit eksternal oleh lembaga pemeriksa independen atau badan akuntan publik membantu dalam mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas pengelolaan keuangan, dan hasil pelaksanaan program kerja.
- 4) Penegakan Hukum dan Sanksi: Penting untuk memastikan adanya penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran atau tindakan korupsi dalam pemerintah daerah, Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran akan memberikan efek jera dan mendorong akuntabilitas yang lebih baik.
- 5) Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan: Meningkatkan kapasitas dan keterampilan pegawai pemerintah daerah juga penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Pelatihan yang berkelanjutan tentang prinsip-prinsip manajemen keuangan, pengendalian internal, kepemimpinan, dan etika dapat membantu pegawai memahami tugas dan tanggung jawab mereka, serta menerapkan praktik terbaik dalam menjalankan tugasnya.
- 6) Evaluasi Kinerja dan Pembelajaran Organisasi: Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi kinerja secara teratur untuk mengukur pencapaian tujuan dan hasil program. Hasil evaluasi harus digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pembelajaran organisasi untuk menjadi lebih baik.

Kompetensi aparatur, kejelasan sasaran anggaran, dan pengendalian internal dilingkungan OPD Pemerintah Provinsi Papua memiliki peran penting dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dikarenakan bahwa

peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai sebagai aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas layanan layanan publik yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan kejelasan sasaran anggaran melibatkan transparansi dan pemahaman yang jelas tentang alokasi dan penggunaan anggaran pemerintah daerah. Peranan kejelasan sasaran anggaran dalam peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan melakukan. Transparansi dan pertanggungjawaban: Kejelasan sasaran anggaran memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat secara terbuka bagaimana anggaran pemerintah daerah dialokasikan dan digunakan dengan Prioritas dan tujuan yang jelas serta Evaluasi dan pengukuran pencapaian kinerja.

Melalui pengendalian internal membantu mencegah terjadinya penyelewengan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah. Dengan adanya pengendalian yang efektif, risiko penyelewengan dan kecurangan dapat diperkecil, sehingga memastikan penggunaan dana publik secara tepat dan sesuai peraturan, sehingga pemerintah daerah dapat Pengelolaan Risiko dengan baik, melakukan Efisiensi dan Efektivitas Operasional, menyajikan Pelaporan Keuangan yang Akurat, kepatuhan terhadap Peraturan dan Kebijakan dan mampu meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Kompetensi aparatur berpengaruh signifikan Terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Provinsi Papua. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan Terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Provinsi Papua. Pengendalian internal berpengaruh signifikan Terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Provinsi Papua. Kompetensi aparatur, Kejelasan sasaran anggaran dan Pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan Terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Provinsi Papua.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Provinsi Papua sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan hasil audit BPK selama 5 (lima) tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP), namun masih sangat diperlukan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi kepentingan masyarakat, hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan yang berkelanjutan, pengembangan kualifikasi Pendidikan aparatur dan peningkatan pengalaman kerja dengan meminimalisasi tingkat rotasi dan mutasi agar aparatur dapat menguasai dan memahami job description tertentu secara baik.

Meskipun Kejelasan sasaran anggaran dilingkungan OPD Provinsi Papua sudah berjalan dengan baik namun masih sangat diperlukan untuk melakukan dievaluasi secara objektif berdasarkan pencapaian hasil yang telah ditetapkan dalam anggaran, melakukan pengendalian dalam pengeluaran instansi pemerintah secara efisien dan efektif sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Dalam pengendalian internal pemerintah daerah perlu untuk melakukan perbaikan dalam Struktur Organisasi agar tata Kelola bisa berjalan dengan baik melalui penempatan aparatur sesuai dengan bidang dan kompetensi yang dimiliki pegawai, melakukan pemisahan

antara fungsi pengelolaan anggaran, akuntansi, dan pemeriksaan internal untuk menghindari terjadinya risiko penyelewengan dan kegagalan dalam proses tata kelola pemerintah daerah, serta membangun komunikasi dan transparansi dalam pertanggungjawaban untuk menjaga akuntabilitas dalam tata kelola dilingkungan pemerintah daerah Provinsi Papua.

Referensi :

- Abdul halim dan Syam Kusufi, "Akuntansi Sektor Publik", Jakarta: Salemba Empat, 2014
- Afdhal, A. M. N., Rahayu, A., & Ardi, D. A. (2021). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, Asimetri Informasi Terhadap Budgetary Slack Pada SKPD Kabupaten Soppeng. 4(April), 1-10
- Allen G., Schick, "University Budgeting Administrative Perspective, Budget Structure, and Budget Process", *Academic of Management Review*, Vol.10, No.4, pp. 794-798, 1985.
- Alfiatu Hidayatullah dan Irine Herdjiono. 2014 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD di Merauke. Unisbank ISBN 978-979-3649-81-8
- Andi Muhammad Nurul Afdhal dan Asmi Rahayu (2022), Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah, *Journal of Management & Business*, volume 5 no. 2 halaman 57, 2022.
- Artikel Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani Ungkap Kelemahan Tata Kelola Keuangan Papua dan Papua Barat" baca: <https://money.kompas.com/read/2021/01/26/174129126/sri-mulyani-ungkap-kelemahan-tata-kelola-keuangan-papua-dan-papua-barat? page=all>. Mutia Fauzia Januari 2021.
- Artikel papua.tribunnews.com (2022), Delapan Kali Pemprov Papua Raih WTP, Gubernur Lukas: Harus Berdampak pada Masyarakat Stella Lauw, <https://papua.tribunnews.com.com umat>, 10 Juni 2022.
- Artikel Pasific.com (2022), 8 Kali Berturut – Turut Raih Opini WTP, Gubernur Lukas Enembe : Jangan Bikin Laporan, Tapi Rakyat Tidak Merasakan, (Tiara) <https://www.pasificpos.com/Kamis> 9 Juni 2022
- Awwaliyah Nur Azizah Dini Widyawati (2022), Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surabaya *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* e-ISSN: 2460-0585 2022
- Bambang Jatmiko (2020), Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman *Jurnal Akuntansi Trisakti* ISSN : 2339-0832 (Online) Doi : <http://dx.doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446> Volume. 7 Nomor. 2, halmana 231-246, 2020
- Dang Panagaman Tamba¹, Widya Astuti² dan Maya Sari³ (2021) Optimalisasi Akuntabilitas Pada Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun, *Jurnal Ekuivalensi* Vol.7 No.2 hal 311, Oktober 2021.
- Deni Harianto (2021), Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* e-ISSN: 2460-0585, Vol. 6, No. 1, Oktober 2021 122
- Dewi Aprilianti¹, Mulyaning Wulan² dan Herwin Kurniawan³, (2020) pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Jakarta Selatan *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* Article Information DOI: <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.454> ISSN:

2580-510X/ P-ISSN: 2548-9453 Vol. 9, No. 2, Juli 2020

- Dwipayani, N. K., & Hutnaleontina, P. (2022). pengaruh kejelasan sasaran anggaran, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor desa se-kecamatan marga kabupaten tabanan. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 28-47. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2281>
- Evi Ratna Yuliasuti dan Ikhsan Budi Riharjo (2022), Pengaruh Kompetensi Petugas, Pengendalian Internal, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN: 2460-0585 ISBN 978-979-3649-81-8*. 2022
- Helin Gustri Mulya, (2022) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi, *JEA Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* e-ISSN : 2656-3649 Vol. 4, No 1, , Hal 192-212 Februari 2022.
- Hutapea, P. dan N. Thoha. 2008. *Kompetensi Komunikasi Plus : Teori, Desain, Kasus Dan Penerapan Untuk HR Dan Organisasi Yang Dinamis*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2008
- I Wayan Pebriyanto dan Ni Komang Sumadi (2021), Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Se-Kecamatan Sukawati). *Hita Akuntansi dan Keuangan* e-ISSN 2798-8961 372 Edisi Oktober 2021
- Jumardi¹, Hendriko Rajagukguk² dan Andri Machmury³ (2022), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi, *E-JURNAL AKUNTANSI*, e-ISSN 2302-8556 DOI: 10.24843/EJA.2022.v32.i08.p06, Vol. 32 Hal. 2029-2046, 2022.
- Komang Rediastiti (2022), Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa, Kompetensi Aparatur dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Dana Desa di Kabupaten Buleleng, *Jurnal Bisnis Kompetif*, ISSN: 2829-5277 Vol. 1, No. 2, Juli 2022.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Government*. Jakarta. Tim Asistensi Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Mardiasmo, 2012. *Otonomi daerah sebagai upaya memperkuat basis perekonomian daerah*. Artikel Melalui www.bappenas.go.id
- Mardiasmo, (2018). *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018),
- Muhammad Yamin, (2021) Pengaruh Kompetensi Aparatur Dan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Pada Dinas Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan) *Jurnal Ekonomi* ISSN: 2085-4633, Vol. 1 No. 2, 2021
- Mukhlisul Muzahid (2021), Pengaruh Kompetensi Aparatur, Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, p-ISSN 1693-8852 e-ISSN 2549-5003, Volume 23, NO. 1, Februari 2021.
- Mulya, H. G. & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1).
- Ni Luh Putu Ari Sutrepti¹, Ni Komang Sumadi² dan Ni Ketut Muliati³, Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Se-Kecamatan Petang. *Hita Akuntansi dan Keuangan* edisi April 2022, e-ISSN 2798-8961 25, 2022.
- Ni Komang Sintia Dwipayani dan Putu Nuniek Hutnaleontina (2022), Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Se-

- Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan jurnal Hita Akuntansi dan Keuangan e-ISSN 2798-8961 28 Edisi Januari 2022.
- Nur Ariyandani, Lukman Chalid dan Nur Alam Umar (2020) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja, P-ISSN: 2089-0982, Website: <http://pasca-umi.ac.id/index.php/tata> Volume 7, Nomor 1, Juni 2020
- Pebriyanto, I. W., & Sumadi, N. K. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hita Akuntansi Dan Keuangan, 2(4), 372-381. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i4.2026>
- Riski Amaliya dan Maryono (2020), Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, pp.122 - 133 p-ISSN : 1979-116X (print) e-ISSN : 2614-8870 Vol. 13, No. 1, 2020
- Widyatama, A., L. Novita dan Diarespati. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia:2017
- Peraturan Pemerintah. (2003b). Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah. (2004). Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2005.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 2008
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2010.
- Peraturan Pemerintah. (2010). Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah. (2013). Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2013 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2013 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Gubernur Papua Nomor 4A Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua;
- Peraturan Pemerintah. (2015). Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Gubernur Papua Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua